

ABSTRAK

Pemerintah merupakan suatu lembaga yang mendapat mandat dari rakyat untuk menjalankan kewenangan dalam melaksanakan dan mengelola urusan kenegaraan di suatu negara. Salah satu fungsi dari pemerintah yaitu menyediakan pelayanan kepada masyarakat atau publik. Dalam hal ini, kepolisian yang merupakan bagian dari pemerintah sangatlah lekat dengan pelayanan. Pelayanan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan salah satu pelayanan yang dilaksanakan oleh Kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi eksisting dari pengaturan terhadap pelayanan pembuatan (SIM) serta mengetahui apa hambatan dan upaya yang dilakukan oleh petugas Kepolisian dalam peningkatan pelayanan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) sebagai upaya peningkatan tertib berlalu lintas di Kabupaten Kendal.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal, dengan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer serta didukung oleh data sekunder, yang kemudian diolah menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa implementasi kebijakan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 di Kabupaten Kendal telah berjalan dengan baik sesuai peraturan tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya belum berjalan secara maksimal masih terdapat berbagai hambatan. Hambatan terhadap implementasi pengaturan berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 dalam pelayanan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) dipengaruhi berbagai faktor, yaitu faktor kesadaran hukum masyarakat, faktor fasilitas dan infrastruktur, faktor sumber daya manusia, dan faktor pengawasan dan penegakan hukum. Upaya yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Kendal dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut, yaitu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat pentingnya memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan cara penggunaan aplikasi SIM *Online*. Selain itu, petugas juga meningkatkan kualitas fasilitas serta menyelenggarakan pelatihan bagi petugas untuk meningkatkan pemahaman yang berkaitan dengan penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM), serta melakukan pengawasan yang lebih ketat untuk mengatasi masalah praktik percaloan.

Kata Kunci: Pemerintah; Pelayanan Publik; Kepolisian; Izin.

ABSTRACT

The government is an institution that receives a mandate from the people to exercise authority in carrying out and managing state affairs in a country. One of the functions of the government is to provide services to the community or the public. In this case, the police which are part of the government are very attached to the service. The service of making a Driver's License (SIM) is one of the services carried out by the Police. This study aims to analyze the existing conditions of the regulation of the manufacturing service (SIM) and find out what obstacles and efforts are made by Police officers in improving the service of making Driver's Licenses (SIM) as an effort to improve traffic order in Kendal Regency.

The research method used is doctrinal legal research, with research specifications in an analytical descriptive manner. The data used in this study is primary data and supported by secondary data, which is then processed using qualitative descriptive techniques.

The results of the study show that the implementation of the policy of the National Police Regulation of the Republic of Indonesia Number 5 of 2021 in Kendal Regency has gone well in accordance with the regulation. However, in its implementation, it has not been running optimally, there are still various obstacles. Obstacles to the implementation of regulations based on the National Police Regulation of the Republic of Indonesia Number 5 of 2021 in the service of making Driver's Licenses (SIM) are influenced by various factors, namely public legal awareness factors, facilities and infrastructure factors, human resource factors, and supervision and law enforcement factors. Efforts made by the Kendal Police Traffic Unit (Satlantas) in overcoming these obstacles, namely increasing socialization to the public about the importance of having a Driver's License (SIM) and how to use the Online SIM application . In addition, officers also improve the quality of facilities and organize training for officers to increase understanding related to the issuance of Driver's Licenses (SIMs), as well as carry out stricter supervision to overcome the problem of prostitution practices.

Keywords: Government; Public Services; Police; Permission.